****

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**(K A K)**

**KEGIATAN :**

**SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN**

**BIDANG JASA DAN PRODUKSI**

**BIRO PEREKONOMIAN**

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**2019**

1. **KETENTUAN UMUM**
   * Nama Kegiatan : Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Bidang Jasa dan Produksi

* + Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro

Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

* + Besar Anggaran : Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta

Rupiah)

* + L o k a s i : BUMD Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

serta luar provinsi

* + Nama Pengguna Anggaran: Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Tengah.

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Sejalan dengan menguatnya pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kontribusi PAD dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13/2006, PAD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat sedangkan lain-lain pendapatan yang sah meliputi dana-dana bantuan.

Kebijakan anggaran Pemerintah sekarang dan ke depan, subsidi akan dikurangi secara perlahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian peran PAD harus makin meningkat. Dengan subsidi Pusat yang makin berkurang, dan sesuai dengan semangat otonomi daerah, PAD akan menjadi sumber utama pendapatan Daerah. Porsi PAD yang lebih besar akan membuat struktur anggaran lebih sehat dan Daerah menjadi lebih mandiri serta lebih leluasa melaksanakan pembangunan.

Ke depan, komponen PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin sulit ditingkatkan karena akan membebani masyarakat. Maka deviden dari BUMD seharusnya dapat menjadi andalan, menyumbangkan porsi yang lebih besar dalam PAD. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham tunggal di 2 BUMD bidang jasa dan produksi (PD Citra Mandiri Jawa Tengah dan PDAB Tirta Utama), pemegang saham mayoritas di 5 BUMD (PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah, PT. Sarana Patra Hulu Cepu, PT. PRPP), dan pemegang saham di BUMN pihak ke 3 (PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma) perlu melakukan pembinaan terhadap BUMD yang dimilikinya, agar kinerja BUMD semakin meningkat dan menjadi penyumbang PAD yang dapat diandalkan.

1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang jasa dan produksi dalam rangka mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan SDM dan aset-asetnya. Selain hal tersebut, kegiatan ini juga merupakan fasilitasi upaya pemecahan masalah masing-masing BUMD/BUMN dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan menuju BUMD/BUMN yang sehat serta peningkatan setoran PAD dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

1. **SASARAN**

Sasaran kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang jasa dan produksi tahun 2019 adalah 8 BUMD/BUMN di Jawa Tengah yang merupakan lembaga bisnis milik Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan PAD serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

1. **BENTUK KEGIATAN**

Kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang jasa dan produksi terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

1. Evaluasi Kinerja triwulanan Tahun 2019 BUMD Bidang Jasa Produksi;
2. Fasilitasi Penyusunan RKAP 2020 BUMD Bidang Jasa dan Produksi;
3. Desk pembahasan deviden atas hasil usaha 2018 BUMD Bidang Jasa dan Produksi;
4. Focuss Group Discussion Peningkatan Kinerja dan Pengembangan BUMD Bidang Jasa dan Produksi;
5. Koordinasi Konsultasi, dan Sinkronisasi Kebijakan BUMD Bidang Jasa Produksi.
6. **TUJUAN DAN OUTPUT :**
7. Evaluasi Kinerja triwulanan Tahun 2019 BUMD Bidang Jasa Produksi;
8. Tujuan :

Memantau capaian kinerja BUMD Bidang Jasa dan Produksi sampai dengan Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III tahun 2019.

1. Output :

Terpantaunya capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi sampai dengan Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III tahun 2019.

1. Fasilitasi Penyusunan RKAP 2020 BUMD Bidang Jasa dan Produksi;
2. Tujuan :

Memantau penyusunan RKAP Tahun 2020 sebelum dimintakan persetujuan oleh RUPS/Pemegang Saham.

1. Output :

Tersusunnya RKAP Tahun 2019 yang realistis dan optimal.

1. Desk pembahasan deviden atas hasil usaha 2018 BUMD Bidang Jasa dan Produksi;
2. Tujuan :

Mendapatkan hasil perhitungan mengenai deviden yang akan disetor atas hasil usaha BUMD/BUMN bidang jasa produksi tahun 2018.

1. Output :

Didapatkannya hasil perhitungan deviden atas hasil usaha tahun 2018.

1. Focuss Group Discussion peningkatan kinerja dan pengembangan BUMD Bidang Jasa dan Produksi;
2. Tujuan :

Mendapatkan wawasan/pengetahuan mengenai solusi permasalahan dalam peningkatan kinerja dan pengembangan BUMD Bidang Jasa dan Produksi.

1. Output :

Adanya gambaran yang lebih jelas mengenai solusi permasalahan dalam peningkatan kinerja dan pengembangan BUMD Bidang Jasa dan Produksi.

1. Koordinasi Konsultasi, dan Sinkronisasi Kebijakan BUMD Bidang Jasa Produksi.
2. Tujuan :
3. Meningkatkan pengetahuan tentang kinerja dan permasalahan BUMD Provinsi lain.
4. Meningkatkan pengetahuan tentang upaya yang dilakukan untuk mencapai target usaha BUMD.
5. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi BUMD Prov. Jateng.
6. Meningkatkan kinerja BUMD Prov. Jateng.
7. Output :
8. Meningkatnya pengetahuan tentang BUMD Provinsi lain.
9. Meningkatnya pengetahuan tentang upaya yang dilakukan untuk mencapai target usaha BUMD.
10. Adanya solusi atas permasalahan yang dihadapi BUMD Prov. Jateng.
11. Meningkatnya kinerja BUMD Prov. Jateng.
12. **JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Kegiatan Koordinasi BUMD dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan: Januari – Desember 2019 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

1. **PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Semarang, April 2018

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

**Drs.BUDIYANTO EP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP.19611006 198703 1 003